

Seized

The 2008 landgrab for food and financial security

**Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan
Keuangan sepanjang tahun 2008**

**Institute for National and Democratic Studies
GRAIN**

Judul

Seized; The 2008 landgrab for food and financial security, GRAIN,
Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan
sepanjang tahun 2008

Naskah Asli

Seized: The 2008 landgrab for food and financial security
<http://www.grain.org/briefings/?id=212>

Penerjemah

Irena Pretika

Penyunting

Syamsul Ardiansyah

Diterbitkan oleh

Institute for National and Democratic Studies atas kerjasama dengan
GRAIN

Jakarta, 2009

Saat ini krisis pangan dan finansial, keduanya, menjadi pemicu terjadinya perampasan lahan secara global. Di satu sisi, pemerintahan negara yang rentan pasokan pangannya dan menggantungkan kebutuhan pangan penduduknya pada impor melakukan perampasan lahan pertanian secara besar-bearan di luar negeri untuk kebutuhan produksi mereka sendiri. Sementara di sisi lain, perusahaan pangan dan investor swasta, yang rakus akan keuntungan di saat terjadi krisis bekepanjangan, melihat investasi atas lahan pertanian di luar negeri sebagai sebuah sumber utama keuntungan yang baru. Alhasil, lahan pertanian yang subur sedikit demi sedikit telah menjadi milik swasta dan terpusat. Jika tak dikendalikan, perampasan lahan pertanian yang dilakukan secara global ini akan berdampak pada berakhirnya model pertanian skala kecil dan kehidupan pedesaan di banyak tempat di seluruh dunia.

Pendahuluan

| 3

Perampasan lahan telah terjadi selama berabad-abad. Seperti yang dilakukan oleh Colombus saat menemukan Amerika atau ketika penjajahan kaum kulit putih yang mencaplok wilayah suku Maori di New Zealand dan suku Zulu di Afrika Selatan, yang semuanya disertai dengan pengusiran terhadap komunitas pribumi. Peristiwa yang selalu diiringi dengan kekerasan masih saja berlangsung hingga saat ini mulai dari China hingga Peru. Jarang sekali kita temukan hari tanpa adanya berita di koran mengenai perjuangan perebutan tanah, seperti kasus perusahaan tambang Barrick Gold yang merebut lahan dataran tinggi di Amerika Selatan atau kasus perusahaan pangan Dole dan San Miguel yang menipu petani di Filipina sehingga terpaksa keluar dari lahan pertanian mereka. Selain itu di banyak negara, pemodal besar swasta saat ini tengah tertarik membeli sejumlah lahan yang sangat luas yang akan dijadikan wilayah konservasi atau taman nasional. Sejauh mata memandang, anda akan melihat semakin banyaknya industri biofuel yang baru bermunculan yang menyatakan diri sebagai jawaban atas perubahan iklim, yang pada akhirnya berakibat pengusiran masyarakat lokal dari tanahnya.

Namun, sesuatu yang ganjil tengah terjadi saat ini. Dua krisis global yang terjadi selama kurun waktu 15 tahun terakhir—krisis pangan dunia dan krisis finansial global di mana krisis pangan menjadi salah satu bagiannya—telah menelurkan trend baru yang sekaligus sangat mengganggu yakni pembelian lahan dalam skala besar untuk kepentingan produksi bahan pangan. Terdapat dua agenda yang saling berhubungan yang semuanya menuntun pada dua macam perampasan lahan. Meski pada titik awal, kedua agenda ini

terlihat berbeda, akan tetapi¹ motif yang ditempuh bertemu di titik yang sama.

Motif pertama adalah ketahanan pangan. Beberapa negara yang menggantungkan kebutuhan pangannya pada impor dan merasa khawatir pada pasar yang semakin ketat, padahal memiliki dana tunai untuk itu, berupaya memenuhi kebutuhan pangan mereka dari luar negeri melalui penguasaan kontrol atas tanah pertanian di negara lain. Negara-negara tersebut melihat inovasi ini sebagai strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat mereka yang memberi keuntungan baik dari segi harga maupun jaminan ketersediaan pangan dibandingkan yang terjadi saat ini. Negara-negara seperti Saudi Arabia, Jepang, China, India, Korea, Libia dan Mesir telah menjalankan sistem ini. Para pejabat tinggi negara-negara tersebut sejak Maret 2008 telah melakukan kesepakatan diplomatik guna mencari lahan-lahan subur di tempat seperti Uganda, Brasil, Kamboja, Sudan dan Pakistan. Mengingat krisis yang masih terjadi di Darfur, di mana World Food Program (WFP) mencoba memberi makan bagi 5,6 juta pengungsi, sepertinya terlihat tidak masuk akal bila ada suatu negara yang membeli lahan di Sudan untuk memproduksi dan mengekspor bahan pangan bagi Negara tersebut dari Sudan. Hal yang sama juga berlaku untuk Kamboja, di mana sekitar 100 ribu keluarga atau sekitar satu juta orang mengalami kekurangan pangan.² Hal-hal tersebut di ataslah yang terjadi hari ini. Karena meyakini kesempatan bertani di Negara mereka semakin

¹Lihat artikel GRAIN, "Making a killing from hunger", Against the grain, Barcelona, April 2008. <http://www.grain.org/articles/?id=39>

² "World No Food Day: CEDAC menyatakan bawa sekitar 100 ribu keluarga di Kamboja kekurangan bahan pangan utama," The Mirror, Phonm Penh, 18 Oktober 2008. <http://tinyurl.com/58xxgg>

terbatas sementara pasar yang ada tidak dapat diandalkan, negara-negara dengan ketahanan pangan yang rentan tersebut mencoba membeli tanah di berbagai tempat untuk memproduksi kebutuhan pangan mereka sendiri. Di sisi lain, negara penyedia lahan rata-rata menyambut gembira kesempatan memperoleh dana segar dari investasi asing ini.

Motif kedua adalah keuntungan keuangan. Berlangsungnya krisis keuangan saat ini, ketika semua pelaku bisnis keuangan dan industri pangan—termasuk di dalamnya pengelola dana pensiun pegawai, pemegang modal swasta yang mencari perputaran yang cepat, lembaga penjamin yang merugi karena kolapsnya pasar derivatif (pasar uang dan pasar saham), dan pedagang bahan pangan mencari strategi baru untuk tetap berkembang—mengalihkan investasinya pada tanah, baik untuk produksi pangan maupun bahan bakar sebagai salah satu sumber keuntungan yang baru. Tanah sendiri sebenarnya bukanlah bentuk investasi yang lazim dilakukan bagi banyak perusahaan transnasional ini. Hal ini karena masalah tanah sarat dengan konflik politik yang di kebanyakan negara melarang orang asing untuk memiliki tanah di negara mereka. Selain itu tanah juga tidak bisa dihargai dalam waktu semalam, seperti isi perut ternak atau emas. Untuk memperoleh keuntungan, investor harus meningkatkan kapasitas produksi tanah--bahkan terkadang harus mengotori tangan mereka sendiri saat menjalankan usaha produksi pertanian. Namun kombinasi krisis pangan dan keuangan telah mengubah lahan pertanian menjadi salah-satu strategi baru dalam pengelolaan aset. Di banyak tempat di dunia, harga pangan sangat tinggi sementara harga tanah sangat rendah. Solusi yang paling sering ditawarkan saat bicara tentang krisis pangan adalah memompa lebih banyak bahan makanan dari lahan yang dimiliki. Jelas sudah bahwa harus lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk

mendapatkan tanah subur paling baik, yang sebisa mungkin sangat dekat dengan sumber mata air.

Kedua motif ini bertemu ketika keduanya dikendalikan oleh sektor swasta. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, kendali kebijakan biasanya berada di tangan pemerintah yang diwujudkan dalam agenda kebijakan publik. Sementara dalam kaitannya dengan keuntungan keuangan, kalangan pemodal menjadi pihak yang secara ketat menjalankan bisnis ini. Namun pada kenyataan hari ini tidaklah demikian. Pada saat pejabat publik bernegosiasi dan melakukan kesepakatan dalam kontrak pengambilan lahan untuk “keamanan pangan”, pihak swasta secara terbuka menginginkan keterlibatan dan berupaya mengambil-alih kendali. Jadi, motif apapun yang kita lihat dari dua pilihan tersebut, keduanya mengerucut di satu tujuan, yakni kontrol korporasi swasta asing atas lahan pertanian di negara lain untuk memproduksi pangan bukan demi kebutuhan masyarakat setempat namun bagi orang lain di tempat lain. Dengan keadaan seperti ini, adakah yang masih menyatakan bahwa kolonialisme adalah sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu?

Para Pemburu Ketahanan Pangan

Perampasan lahan bagi tersedianya pangan adalah salah satu hal yang banyak orang kerap dengar, kerap diberitakan di koran bahwa Arab Saudi dan China tengah membeli lahan pertanian di seluruh dunia, mulai dari Somalia hingga Kazakhstan. Namun sebenarnya masih banyak negara yang terlibat. Contoh terdekat dapat dilihat dari daftar berikut yang sangat mengesankan tentang perampasan lahan untuk ketahanan pangan, seperti yang terjadi di kawasan Asia (seperti China, India, Jepang, Malaysia dan Korea Selatan),

kawasan Afrika (Mesir dan Libya), serta kawasan Timur Tengah (Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab). Gambaran lebih jelas mengenai siapa, dimana, untuk apa dan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari tanah tersebut dapat dilihat di lampiran.

Situasi yang terjadi di negara-negara tersebut tentu saja membawa dampak yang berbeda-beda. China pada dasarnya adalah negara yang secara independen dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Namun, China juga memiliki populasi yang besar, sementara lahan pertanian sedikit demi sedikit menghilang karena pembangunan industri. Pasokan air untuk pertanian semakin lama semakin berkurang. Hal-hal tersebut menjadi bahan-bahan pikiran bagi kepemimpinan Partai Komunis yang berkuasa di negara tersebut. Dengan sekitar 40 persen petani dunia berada di China namun hanya tersedia 9 persen lahan pertanian yang tersedia dan bisa diolah, sangatlah mengejutkan bila masalah ketahanan pangan belum menjadi bagian dari agenda pemerintahan China. Padahal dengan pendapatan dari perdagangan internasional sebesar 1.8 trilyun dollar Amerika, China memiliki cukup banyak dana yang dapat ditanamkan di luar negeri guna keamanan pangan mereka. Seperti yang diketahui oleh banyak pemimpin kaum tani dan aktivis agraria di wilayah Asia Tenggara, bahwa pemerintahan Beijing telah melakukan “outsourcing” produksi pangannya secara bertahap bahkan sebelum terjadinya krisis pangan global pada tahun 2007. Melalui diplomasi geopolitik China terbaru dan strategi investasi pemerintah bertajuk “go abroad” yang dilakukan secara agresif, sekitar 30 kesepakatan kerja sama pertanian telah disahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Semuanya memberi akses bagi perusahaan China untuk melakukan pertukaran teknologi, pelatihan dan bantuan pendanaan untuk pembangunan

infrastruktur dengan “negara sahabat” yang memiliki lahan pertanian. Hal ini tidak hanya terjadi di Asia, namun juga terjadi di hampir seluruh wilayah Afrika, melalui proyek-proyek yang berbeda dan rumit.³ Mulai dari Kazakhstan hingga Queensland, Mozambik hingga Filipina, sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dan mudah dikenali tengah berlangsung, dengan perusahaan dari China menyewa atau membeli tanah, membuat pertanian yang besar, membawa petani, ilmuwan dan tambahan pekerja, guna dipekerjakan dalam kegiatan produksi bahan pangan. Kebanyakan pertanian milik China ini diperuntukkan untuk penanaman beras, kacang kedelai dan jagung, selain itu juga ditanam tanaman untuk industri bahan bakar nabati (biofuel) seperti gula, singkong atau sorgum.⁴ Beras yang diproduksi di luar negeri tak lain dan tak bukan adalah beras hibrida yang berasal dari bibit yang diimpor dari China dan secara antusias diajarkan oleh para petani dan ilmuwan China mengenai “cara bertani ala China” kepada para petani dari Afrika dan negara lainnya. Akan tetapi para petani lokal seperti di Afrika yang dipekerjakan di lahan pertanian milik China, sering kali tidak mengetahui apakah beras yang dihasilkan mereka diperuntukkan bagi mereka sendiri atau bagi masyarakat

³ Pemerintah China baru-baru ini mengumumkan sebuah komitmen senilai 5 milyar dollar Amerika bagi perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di bidang pertanian di Amerika selama 50 tahun melalui lembaga baru bernama China-Africa Development Fund (Lembaga Dana Pembangunan China-Afrika/ CADF). CADF adalah sebuah lembaga pemegang modal swasta yang salah satu pemegang sahamnya adalah China Development Bank. Lihat artikel T.Michael Johnny, :China earmarks US\$5 billion for food production on continent,” The News, Monrovia, 23 April 2008. <http://tinyurl.com/55hlef>

⁴ China adalah tanah asal kacang kedelai dan konsumen terbesar di seluruh dunia, namun saat ini negara tersebut mengimpor sekitar 60 % kebutuhan kedelainya. Sementara untuk tepung jagung, China akan segera menjadi pengimpor bersih. Kedua jenis komoditi pertanian ini adalah bahan yang sangat diperlukan dalam industri daging dan susu yang sedang tumbuh di China.

China. Namun secara alamiah, melihat banyaknya kesepakatan yang dilakukan terhadap tanah mereka, para petani ini akhirnya menganggap bahwa beras yang mereka hasilkan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pangan di China, yang akhirnya memunculkan kemarahan.⁵

Pada hakikatnya, strategi perampasan lahan yang dilakukan China adalah strategi yang konservatif: pemerintah membatasi spekulasi dan memaksimalkan pilihannya untuk memasok kebutuhan pangan negara untuk jangka waktu yang panjang. Tentu saja hal tersebut diperkuat dengan tekanan yang semakin besar terhadap keberadaan lahan pertanian dan ketersediaan air di China yang membuat China tidak memiliki pilihan lain selain berekspansi ke luar negeri, ungkap seorang pakar dari Akademi Ilmu Pertanian China.⁶ Faktanya, dalam strategi investasi luar negeri China, bahan pangan saat ini berada dalam kedudukan yang tinggi berbarengan dengan kebutuhan energi dan mineral. Di pertengahan tahun 2008, dalam pembuatan rancangan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan “outsourcing” produksi pangan, Menteri Pertanian China telah bertindak cukup jauh. Rancangan tersebut tidak untuk masyarakat umum,⁷ namun di dalamnya akan terlihat seberapa jauh atau seberapa lama pemerintah

⁵ Lihat blog “Oryza hybrida”, blog GRAIN mengenai beras hibrida, kumpulan cerita mengenai beras hibrida China yang mengambil alih produksi lahan di luar negeri: <http://www.grain.org/hybridrice/?blog>. Sebuah laporan investigasi yang dilakukan stasiun televisi Perancis pada bulan Mei 2008 untuk TF1 berisi bagaimana masalah ini terjadi di Kamerun: <http://tinyurl.com/6ful9s> (video dan skript hanya tersedia dalam bahasa Perancis)

⁶ Dikutip dari pernyataan Li Ping, “Hopes and strain in China’s overseas farming plan”, di Economic Observer, Beijing, 3 Juli 2008. <http://tinyurl.com/5hkzb6>

⁷ Laporan yang lebih detail diberikan oleh Li Png, in ibid.

diharapkan dapat menanggung kesepakatan finansial tersebut. Dengan demikian, terdapat banyak indikasi di sinilah pihak swasta diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar. Setelah diskusi yang dilakukan di bulan Juli, kebijakan tersebut untuk sementara waktu ditangguhkan. “Hal ini terlalu dini,” ungkap salah satu pejabat kementerian setempat. “Kami masih harus melihat dulu perkembangan dari investasi jenis ini.”⁸

Sementara itu negara-negara teluk—seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—menghadapi kondisi yang sangat berbeda. Sebagai negara yang berada di gurun pasir, negara-negara Teluk sangat kekurangan lahan yang subur dan air yang memadai yang dibutuhkan untuk bercocok tanam dan beternak. Namun negara-negara tersebut memiliki banyak uang dan kaya akan minyak yang memungkinkan negara-negara tersebut mempengaruhi negara-negara lain demi memenuhi kebutuhan pangannya. Pada saat krisis pangan seperti terjadi saat ini, pukulan keras telah menimpa negara-negara Teluk. Ketergantungan negara-negara ini terhadap impor pangan dari luar negeri (terutama Eropa) disertai dengan pergerakan nilai tukar mata uang mereka yang mengacu pada dollar AS (kecuali Kuwait, namun itu pun baru sejak akhir tahun lalu) membuat negara-negara tersebut mengimpor lebih banyak “inflasi tambahan” saat kenaikan harga pangan di pasar global dan jatuhnya nilai dollar AS terjadi secara serempak. Tagihan atas impor pangan mereka telah menggelembung dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 8 miliar dollar Amerika menjadi 20 miliar dollar Amerika. Kemudian, sejak populasi mereka diperbesar oleh

⁸ “Chinese debate pros and cons of overseas farming investments,” *Guardia*, 11 Mei 2008. <http://tinyurl.com/66zhq4>.

keberadaan buruh migran berpenghasilan rendah⁹ yang membangun kota dan menjadi pekerja di rumah sakit mereka, maka sudah menjadi keharusan bagi negara-negara Teluk ini menerapkan kebijakan harga pangan yang terjangkau. Selain itu semua, saat ini mereka tengah duduk di atas bom waktu, ketika dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, negara-negara tersebut dihadapkan pada kemungkinan habisnya cadangan minyak yang saat ini menjadi topangan ekonomi yang paling utama.

Ketika krisis pangan akhirnya pecah, dan suplai beras dari Asia terpangkas, pemimpin negara Teluk membuat perhitungan cepat dan membuat kesimpulan yang sulit. Arab Saudi, misalnya, memutuskan untuk menghentikan memproduksi gandum, makanan pokok mereka pada tahun 2016 akibat dari semakin berkurangnya cadangan air. Selain itu negara ini juga memilih untuk mengambil-alih kendali seluruh proses penyediaan pangan ini ketimbang menanam dan mengapalkannya dari negara lain. Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) yang sekitar 80 persen penduduknya merupakan pekerja migran—yang hampir seluruhnya berasal dari Asia dan mengkonsumsi beras—juga dilanda kepanikan. Di bawah perlindungan Badan Kerja Sama Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council – GCC), UEA bersama dengan Bahrain dan Negara-Negara Teluk lainnya merumuskan suatu strategi bersama dalam memproduksi pangan secara *outsourc*e. Tujuannya adalah untuk mengamankan kesepakatan, terutama yang di kalangan

⁹ Pada tahun 2007, penduduk asing diperkirakan berjumlah 63% dari total populasi di Negara Teluk. Di Uni Emirat Arab, keberadaan mereka berjumlah lebih dari 82%. Jumlah ini diperkirakan akan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya pekerja migran yang datang, mereka yang melarikan diri dari kesulitan ekonomi dan mereka yang di negaranya tidak mendapatkan pekerjaan.

negara Islam lain, tentang pertukaran aliran dana dan pasokan minyak dari negara Teluk asalkan negara-negara tersebut dapat menjamin bahwa perusahaan dari negara Teluk memiliki akses terhadap lahan pertanian termasuk hasil produksinya. Berikut ini negara-negara yang menjadi sasaran utama yakni Sudan dan Pakistan, yang diikuti dengan beberapa negara di Asia Tenggara (seperti Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam), Turki, Kazakhstan, Uganda, Ukraina, Georgia, Brasil dan daftar ini masih akan bertambah panjang.

Pergerakan yang terjadi di negara-negara Teluk tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Antara bulan Maret hingga Agustus 2008, masing-masing negara di GCC atau konsorsium industri melakukan kontrak sewa jutaan hektar lahan pertanian dengan asumsi panen dapat dilakukan paling cepat pada tahun 2009. Pemimpin negara-negara yang tergabung dalam GCC berencana mengadakan pertemuan penting pada Oktober 2008 dan Januari 2009 yang akan menyelesaikan kebijakan resmi mengatur hal ini. Meski bagi negara-negara tersebut komponen-komponen yang terkandung dalam strategi tersebut tidak mengandung hal-hal yang kontroversial (lihat Kotak 1), namun lembaga internasional seperti Organisasi Pangan Dunia (FAO) memandang perlu untuk turun tangan dan secara langsung terlibat dalam mengatur hubungan internasional terkait dengan isu ini. "Saya tidak keberatan negara Arab ingin melakukan investasi atas hal ini," ungkap Jacques Diouf, Direktur FAO, namun menurutnya "tanah itu seperti kentang panas dalam dunia politik." Ia memiliki beberapa staf FAO yang berkantor di beberapa negara Teluk saat ini untuk

menghindari “skandal yang tidak diharapkan” dari manufer-manufer yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.¹⁰

| 13

Kotak 1 : Karakteristik Strategi Perampasan Lahan Negara-negara Teluk

- Pemerintah memberi dana (untuk mengorganisir kesepakatan dan mengerjakan perjanjian bilateral yang spesifik seperti mengeluarkan pembatasan ekspor pangan atau membuka kedutaan di tempat di mana kontrak tersebut akan dilangsungkan) namun sebenarnya mengharapkan--sebagai ungkapan lain dari memerintahkan--bahwa sektor swasta yang mengambil alih proyek tersebut untuk waktu yang lama
- Mempertahankan tradisi Islam dalam menolong si miskin dan berbagi pada mereka yang berkekurangan, yang diartikan sebagai sebuah komitmen untuk memberikan sebagian pangan kepada rakyat di negara produsen atau pada pasar domestik. Lembaga keuangan syariah didirikan untuk menyalurkan dana di wilayah lokal. Cara lain yang ditempuh juga melalui alih teknologi, pemberian dan pelatihan kerja, dan lainnya
- Sesungguhnya merupakan pendekatan jangka panjang
- Mengumbar kerja sama retorik yakni keuntungan bagi semua pihak (win-win outcomes)
- Alasan pokok pertukaran pangan untuk energi yang dimasukkan dalam banyak kontrak proyek adalah untuk menyediakan pasokan minyak dan gas sebagai imbalannya

¹⁰ Margaret Coker, “UN food chief warns on buying farms,” Wall Street Journal 10 September 2008. <http://tinyurl.com/5uahmp>.

China dan negara-negara Teluk memang merupakan pemain terbesar dalam bisnis ini, namun negara-negara lain ternyata juga tengah melakukan pergerakan agresif dalam mencari lahan pertanian di luar negeri yang didorong oleh hal yang baru terjadi tahun ini. Jepang dan Korea Selatan misalnya, merupakan dua negara kaya yang pemerintahnya memilih untuk menyandarkan diri pada import dari pada memenuhi sendiri kebutuhan pangan rakyat mereka. Keduanya memperoleh sekitar 60 persen pasokan pangan mereka dari luar negeri. (Kasus Korea Selatan misalnya, jika memasukkan beras jumlahnya akan menjadi 90 persen). Di awal 2008 pemerintahan Korea Selatan mengumumkan rumusan rencana nasional untuk memfasilitasi akuisisi lahan di luar Korea bagi kepentingan produksi pangan, di mana sektor swasta ditunjuk sebagai pemain utama. Bahkan sebelum itu, perusahaan pangan Korea telah membeli tanah di Mongolia dan wilayah timur Rusia sebagai tempat produksi pangan dan hasilnya diekspor ke Korea. Sementara itu berlangsung, pemerintah Korea sendiri tengah mencari pilihan tempat lain di Sudan, Argentina dan Asia Tenggara. Di pihak lain, Jepang mengandalkan seluruh pengaturan impor pangan ini pada sektor swasta, sementara pemerintah Jepang sendiri melakukan berbagai upaya licik melalui jalur politik dalam skema perjanjian perdagangan bebas, perjanjian penanaman modal bilateral dan pakta kerja sama pembangunan. Namun ini bukanlah peran yang pasif. Pada setiap pelaksanaannya aparat administrasi Jepang selalu menentang setiap tekanan untuk merestrukturisasi sistem pertanian di Jepang, yakni ketika lahan pertanian yang dikelola oleh keluarga dan perusahaan tidak diijinkan untuk memiliki tanah. Saat ini, ketika firma-firma Jepang membeli lahan pertanian di berbagai tempat seperti China dan Brasil, tekanan tersebut bisa jadi akan semakin keras.

India juga telah terkena wabah perampasan lahan. Pertanian di India saat ini kacau-balau yang dapat dilihat dari jajaran dewan direksi korporasi India dan kantor pemerintahannya yang ada di New Delhi atau Pune. Masalah utama negara ini adalah tingginya biaya produksi ditambah dengan semakin berkurangnya lahan subur dan ketersediaan cadangan air. Sebagai tambahan, perebutan terhadap akses akan tanah telah menjadi demikian rumit yang utamanya disebabkan oleh semakin meluasnya perlawanan sosial terhadap Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones- SEZ). Dipicu oleh krisis pangan global yang belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, sejumlah pimpinan industri pertanian India bersama dengan badan usaha milik negara-Perusahaan Perdagangan Negara (State Trading Corporation – STC)—memandang perlunya memenuhi kebutuhan pangan negara di luar negeri. Di luar negeri mereka menanam tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati, kacang-kacangan dan kapas sementara di dalam negeri mereka tetap mempertahankan menanam gandum dan beras karna dipandang lebih murah.¹¹ Strategi baru ini berjalan dengan baik di Birma yang memasok 1 metrik-ton hingga 4 metrik-ton kacang lentil yang harus diimpor India setiap tahunnya sebagai cadangan pasokan kacang lentil di negara ini. India sendiri memproduksi sekitar 15 metrik-ton kacang lentil setiap tahunnya. Dibandingkan dengan keharusan untuk terus membeli dari Birma, para pedagang dan pengolah pangan di India saat ini memilih untuk masuk dan menanam kacang lentil sendiri di sana. Cara ini lebih murah dan mereka dapat mengontrol keseluruhan proses tersebut. Ditopang oleh

¹¹ India mengkonsumsi 11 juta ton minyak goreng setiap tahunnya, separuhnya diimpor. Impor utama adalah minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia, termasuk juga minyak kedelai dari Brazil, Paraguay dan Uruguay. Sementara untuk kacang-kacangan setiap tahun India mengkonsumsi 18 – 19 juta ton kacang lentil, setengahnya berasal dari impor.

dukungan pemerintah, korporasi India menyewa lahan pertanian di Birma untuk memproduksi tanaman pangan yang akan langsung diekspor ke India. Pemerintah India memberikan dana tambahan khusus bagi pemerintahan junta militer Birma guna memperbaiki infrastruktur pelabuhannya serta secara agresif mendorong terbentuknya perjanjian perdagangan bebas dan penanaman modal untuk mengurai benang kusut kebijakan di antara kedua negara tersebut. Tidak cukup sampai di situ, para CEO dari India juga membeli perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan sekarang mencoba melebarkan sayap ke Uruguay, Paraguay, dan Brasil untuk mencari lahan yang dapat ditanami oleh kacang-kacangan dan kedelai untuk diekspor ke India. Sementara itu bank sentral India, the Reserve Bank of India, secara cepat berupaya mengganti kebijakan hukum India sehingga dapat memberikan pinjaman dana bagi perusahaan swasta India yang dipergunakan untuk membeli tanah di luar negeri, seperti yang diberikan pada STC. Karena kemungkinan tersebut belum dipikirkan secara mendalam sebelumnya, maka kebijakan ini belum ada.

Hal-hal di atas kelihatannya seperti permainan tingkat tinggi di mana para diplomat dan investor berseliweran dari negara satu ke negara yang lain mencari lahan pertanian yang baru yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Namun sebenarnya adalah bahwa pemerintahan negara-negara di Afrika dan Asia yang diincar tanahnya ternyata telah siap menerima proposal-proposal tersebut. Pada akhirnya mereka menganggap ini semua berarti adanya aliran dana segar yang masuk dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di pedesaan, memperbaiki fasilitas penyimpanan dan pengapalan (pendistribusian), dan mengonsolidasikan kegiatan industri dan pertanian. Pada awalnya ada begitu banyak program penelitian dan

pembibitan yang dijanjikan akan dilakukan pada beberapa kesepakatan tersebut. Sesungguhnya, “investasi di bidang pertanian” telah benar-benar menjadi kumpulan jerit tangis dari hampir seluruh penguasa dan para ahli yang dibebankan mencari jalan keluar atas krisis pangan global dan memandang bahwa, mungkin tidak diharapkan, ledakan perampasan lahan merupakan langkah yang dinilai tepat. Betapapun sudah sangatlah jelas bahwa di balik retorika “win-win solution” tujuan sesungguhnya dari kontrak-kontrak kesepakatan tersebut bukanlah pembangunan pertanian, lebih khusus lagi pembangunan daerah pedesaan, namun lebih sederhana dari itu semua semata hanyalah pembangunan bisnis pertanian. Mungkin hal tersebut hanya dapat dimengerti dari kontradiksi yang terjadi di saat perampasan lahan.

Beberapa bulan lalu, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, secara resmi mengumumkan menyewakan lahan padi Khmer kepada Qatar dan Kuwait, sehingga kedua negara ini dapat memproduksi sendiri beras mereka. Meski area yang dimaksud tidak secara jelas dikemukakan, namun sudah pasti sangatlah luas, karena pemerintah Kamboja mendapatkan laba pinjaman hampir sebesar 600 juta dollar Amerika. Namun, pada saat yang bersamaan, Program Pangan Dunia (World Food Programme) telah harus mulai mengapalkan bantuan pangan senilai 35 juta dollar Amerika ke daerah pedesaan Kamboja yang terserang wabah kelaparan. Di Filipina, ketika banyak orang harus mengurangi jatah makan mereka, delegasi-delegasi dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain sejak Maret 2008 secara rutin terbang keluar masuk negara ini untuk mengamankan lahan yang digunakan untuk memasok pangan mereka, memancing keheranan. Untuk mencegah kontroversi, Presiden Gloria Macapagal Arroyo memasukkan kontrak pengambilan lahan bersama Uni

Emirat Arab ini ke dalam kebijakan baru yang dibuat rejimnya yakni kebijakan mengenai industri halal.¹² Dengan cara ini, proyek bersama Uni Emirat Arab terlihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program yang didanai pemerintah dalam membangun sebuah industri nasional yang baru, dari pada kenyataan sebenarnya: yakni pengalihan lahan subur dan mungkin menyebarkan lahan pertanian pada orang-orang asing yang kaya. Bahkan hal yang lebih problematis muncul ketika beragam dana telah dikirimkan ke Burma sebagai alat pembayaran atas hak penggunaan eksklusif lahan pertanian di negeri tersebut. Hal ini terjadi karna Burma adalah negara yang diblokade oleh kelompok kerja sama regional ASEAN, dan ASEAN sendiri saat ini telah menyepakati kerja sama perdagangan bebas bersama dengan negara-negara kaya seperti Australia, Selandia Baru dan Uni Eropa. Gerakan sosial yang ada di wilayah tersebut saat ini tengah sangat khawatir atas dukungan bawah tanah tersebut terhadap rejim militer Burma yang represif. Sementara di tempat lain kesepakatan perampasan lahan juga terjadi dengan pola yang sama. Di Uganda, massa dalam jumlah besar serta-merta berteriak sesaat setelah Reuters mewartakan bahwa pemerintah Uganda menjalin kontak dengan Kementerian Pertanian Mesir dalam upaya menyewakan lebih dari 840 ribu hektar lahan pertanian Uganda (sekitar 2,2 persen total daratan Uganda) kepada perusahaan Mesir untuk memproduksi gandum dan jagung bagi Kairo. Meski pejabat pemerintah menyangkal telah terjadinya kesepakatan tersebut, namun parlemen Uganda mengadakan pemanggilan darurat untuk menyelidiki masalah tersebut.

¹² Cleofe Maceda, "UAE signs MoU with Phillipines to ensure food supply.", Gulf News, 22 Juli 2008. <http://tinyurl.com/5uts7a>.

Namun sayang, detail-detail yang tepat—seperti berapa hektar, berapa banyak uang yang dikucurkan, apa yang sebenarnya dilakukan, dalam kondisi yang seperti apa—mengenai sejumlah perampasan lahan untuk penyediaan pangan di luar negeri sangat sulit ditemukan. Pemerintah yang terlibat tidak diragukan lagi takut terhadap reaksi secara politik jika masyarakat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

Kotak 2 : Perampasan lahan dari Jepang

Lima konglomerat perdagangan mendominasi pasar makanan dan bisnis pertanian di Jepang, yakni Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni dan Sumitomo. Mereka terlibat dalam pembelian, pengolahan, pengapalan, perdagangan dan penjualan eceran. Sebagian besar lebih mengutamakan melayani kebutuhan domestik pasar bagi masyarakat Jepang. Namun karena pasar semakin menua dan menyusut, pertumbuhan harus dilakukan di tempat yang lain.

Perusahaan pangan Jepang kemudian pindah ke luar negeri (untuk menangkap pasar yang baru) dan lebih ke hulu (terhadap produksi). Marubeni dan Mitsui, dan dalam tingkat yang lebih kecil adalah Mitsubishi, bermaksud untuk masuk dalam deretan pedagang padi papan atas dunia, setaraf dengan Arthur Daniels Midland dan Bungo. (Berdasarkan perhitungan mereka Cargil terlalu jauh untuk dikejar). Mereka membeli dan membangun fasilitas baru yang besar dan beroperasi di Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Marubeni baru – baru ini membeli delapan fasilitas penyimpanan padi dan dua gudang besar di Amerika Serikat senilai 48 juta dollar Amerika. Dengan cara ini mereka dapat langsung memotong pasar dan membeli kacang kedelai serta jagung langsung dari produsennya di Amerika Serikat. Mengamankan pijakan di China, di mana ADM, Bunge dan Cargill tidak terlalu kuat, menjadi prioritas dari strategi baru yang perusahaan-perusahaan ini jalankan sekarang.

Tetapi, mengelola gudang dan muatan peti kemas tidak lagi cukup bagi

para pedagang papan atas Jepang ini. Memindahkan hulu usaha juga menjadi bagian dari agenda baru ini. berdasarkan sejumlah laporan, perusahaan-perusahaan Jepang telah memiliki 12 juta hektar lahan pertanian di luar negeri untuk memproduksi pangan dan pangan hewan. Beberapa di antaranya berada di China, di mana pada tahun 2006 Asahi, Itochu dan Sumitomo mulai menyewa ratusan hektar lahan pertanian untuk memproduksi pangan organik bagi pasar China dan Korea. Sementara pada tahun 2007, Asahi melakukan perluasan proyek pertama ini dan membangun pabrik susu pertama di China oleh pengusaha Jepang. Setahun kemudian yakni September 2008, Asahi memperoleh keuntungan dari tragedi susu bermelamin dan meluncurkan susu cair pertama mereka yang ditingkatkan hingga 50 persen – sebuah bencana kapitalisma dalam wajah terbaiknya! Sementara itu, Itochu telah menutup cabangnya dan beraliansi dengan COFCO, perusahaan perdagangan dan pengolahan produk pertanian papan atas China yang dilaporkan terlibat dalam banyak beberapa perkara akuisisi lahan pertanian.

Perusahaan-perusahaan Jepang juga menggali tanah di Brasil. Di akhir tahun 2007, Mitsui membeli 100 ribu hektar lahan pertanian milik petani Brasil – yang setara dengan 2 persen area pertanian di Jepang – untuk produksi kacang kedelai melalui bagiaannya di Multigrain SA yang kini memiliki saham sekitar 40 persen.

Magnet segar bagi investor swasta

Di saat pemerintah memiliki agenda dalam menciptakan ketahanan pangan, investor swasta memiliki agenda yang berbeda, yakni menghasilkan keuntungan. Krisis pangan bersama dengan krisis keuangan global telah mengubah kontrol atas tanah menjadi magnet baru yang penting bagi investor swasta. Kita tidak sedang membicarakan mengenai praktik bisnis pertanian antar bangsa yang khas, di mana Cargill kemungkinan besar terlibat dalam penghancuran

perkebunan kacang kedelai di Mato Grosso di Brasil. Tapi kita sedang berbicara mengenai kepentingan baru dalam memperoleh kontrol atas lahan itu sendiri. Ada dua orang pemain di sini, yakni industri pangan dan, yang lebih signifikan adalah, industri keuangan.

Dalam lingkaran industri pangan, perusahaan perdagangan dan pengolahan Jepang dan Arab mungkin adalah perusahaan-perusahaan yang paling sering terlibat dalam akuisisi lahan di luar negeri saat ini. Bagi perusahaan Jepang, strategi ini menyatukan pertumbuhan organik mereka (lihat Kotak 2). Sedangkan bagi perusahaan Timur Tengah, mereka berpegang pada kebijakan pemerintahan negara mereka yang membuka pintu dan bergerak keluar mengatasnamakan ketahanan pangan.

Masalah dalam industri keuanganlah yang porsinya lebih besar. Bagi sebagian besar orang di tampuk kekuasaan, dalam krisis pangan global ini terdapat masalah yang sangat besar, yakni bahwa kemanapun anda melihat, perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah, berkurangnya pasokan air dan peningkatan jumlah perkebunan monokultur telah mengemuka dan menjadi tantangan terbesar dalam ketersediaan pangan bagi planet kita di masa depan. Hal ini diartikan bahwa akan terjadi pasar yang lebih ketat, harga yang tinggi dan tekanan untuk mendapatkan yang lebih banyak dari lahan. Pada saat yang sama, industri keuangan, yang bertaruh sangat besar atas uang yang terbatas akibat hutang dan kerugian, tengah mencari tempat aman untuk berlindung. Seluruh faktor ini yang membuat lahan pertanian menjadi mainan baru yang dapat digunakan untuk meraih keuntungan. Pangan harus diproduksi, harga akan selalu tinggi, lahan murah telah tersedia, semuanya akan terbayar—itulah racikannya. Hasilnya? Sepanjang tahun 2008 sepasukan biro investasi, lembaga pemegang modal swasta,

dana pelindung dan sejenisnya secara cepat telah mengambil lahan-lahan pertanian di seluruh dunia—dan dengan pertolongan yang sangat besar dari lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia (World Bank), Perusahaan Keuangan Internasional (International Finance Corporation) dan Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa (European Bank for Reconstruction and Development). Lembaga-lembaga inilah yang melumasi jalan aliran investasi ini dan “membujuk” pemerintah untuk mengubah kebijakan kepemilikan tanah mereka sehingga dapat diganti (lihat Kotak 3). Hasilnya, harga tanah mulai naik dan menciptakan tekanan yang lebih besar untuk bergerak lebih cepat.

Kotak 3: Kesepakatan Kebijakan Pertanian

Banyak negara telah mengubah hukum, kebijakan dan praktik kepemilikan tanah mereka saat ini untuk menyesuaikan diri dengan krisis pangan dan kredit yang tengah terjadi yang akhirnya menciptakan tekanan atas tanah. China tengah mendorong reformasi penting untuk membuat petani lebih mudah menjual hak penggunaan lahannya, kecuali yang dimiliki oleh negara atas nama rakyatnya. Reformasi tersebut akan membuat setiap petani lebih mudah menjual atau menyewakan hak penggunaan tanahnya, dan menggunakan jenis hak tersebut sebagai jaminan saat meminjam uang. Banyak pihak meramalkan bahwa hal ini akan memfasilitasi restrukturisasi besar-besaran atas lahan pertanian di China dari kepemilikan lahan kecil yang tidak terhitung jumlahnya—yang telah secara tidak adil dipersalahkan atas terjadinya krisis keamanan pangan di China belakangan ini—menjadi kepemilikan beberapa lahan besar, di mana perusahaan akan dapat hak penguasaan dan pengelolaan yang lebih besar karenanya. Pemerintah Kazakhstan, sebagai salah satu bentuk tawaran untuk menarik investor asing terhadap lahan pertaniannya, telah mengimplementasikan kebijakan pembagian tanah dan hak penggunaan tanah permanen. Ukraina berharap dapat mencabut larangan atas penjualan lahan pertanian kepada orang asing dalam waktu dekat. Sudan,

di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh pemerintah, telah mengeluarkan perjanjian sewa tanah selama 99 tahun dengan nilai yang sangat rendah, jika tidak ingin dibayar gratis.

Sementara Brasil tengah bergerak ke arah yang lain. Krisis pangan yang tengah terjadi yang datang hampir berbarengan dengan kegilaan masyarakat dunia atas biofuel dan telah membuat banyak investor asing tertarik membeli lahan pertanian di Brasil, membuat Kongres Brasil mempertimbangkan untuk membuat undang-undang untuk membuat seluruh proses ini menjadi lebih transparan. Undang-undang tersebut mengharuskan operator Brasil yang membeli lahan untuk menunjukkan seberapa besar partisipasi investor asing dalam kepemilikan saham mereka dan membuat kode pendaftaran khusus bagi pembelian yang melibatkan modal dari luar negeri. (Sejak tahun 1971, perusahaan asing dapat membeli tanah di Brasil hanya melalui rekan Brasil mereka atau dengan mengganti tempat tinggal mereka. Namun hukum ini sangat lemah dalam penerapannya). Ketika beberapa investor menganggap enteng dan bahkan berniat mematahkannya di tangan para spekulan, Undang-undang tersebut ternyata mendapat dukungan penuh dan bahkan akan diterapkan di akhir tahun 2008. Paraguay juga tengah mempertimbangkan hal yang sejenis: pada bulan Oktober 2008, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mulai menguatkan hukum yang telah lama ada yang melarang orang asing membeli lahan pertanian di negara tersebut. Namun di sisi lain, Pakistan memiliki peraturan yang jelas-jelas mengizinkan investor asing memiliki dan mengoperasikan apa yang mereka kategorikan sebagai "lahan korporasi", tapi hukum negara mengenai ketenagakerjaan tidak diterapkan dalam hal ini. Masalah ini dilaporkan tengah dicari kemungkinan perubahannya.

Di belakang layar, World Bank dan EBRD, dan beberapa lembaga keuangan lain, secara aktif menyarankan pemerintah berbagai negara untuk memodifikasi kebijakan kepemilikan tanah dan pengelolaannya, yang dapat mendorong lebih banyak investor asing untuk menaruh uangnya di lahan pertanian di luar negeri. Pejabat World Bank menyatakan bahwa

mengubah hukum kepemilikan tanah merupakan target integral dari paket kesepakatan senilai 1.2 milyar dollar Amerika menghadapi krisis pangan di Afrika. EBRD tengah melakukan tarik ulur dalam reformasi kebijakan pertanahan sebagai tanggapan atas krisis pangan di Eropa dan Asia Tengah, dengan target utama adalah negara-negara pengekspor utama padi-padian seperti Rusia, Ukraina, Rumania, Bulgaria dan Kazakhstan.

Sektor swasta tahun ini tengah pusing tujuh keliling karna harus segera melakukan akuisisi lahan pertanian. Deutsche Bank dan Goldman Sachs, misalnya, sedang memegang kendali atas industri peternakan di China. Sementara ketika seluruh pandangan tengah fokus pada Wall Street di akhir September 2008, keduanya memasukkan uang mereka ke peternakan babi terbesar di China, peternakan unggas dan tempat pengolahan daging—termasuk di dalamnya hak atas lahan pertanian. Black Rock Inc. yang berkantor pusat di New York, lembaga pengelola uang terbesar di dunia dengan lebih dari 1.5 trilyun dollar Amerika dalam buku keuangannya, baru saja merancang dana pelindung pertanian sejumlah 200 juta dollar Amerika, yang 30 juta dollar di antaranya akan digunakan untuk memperoleh lahan pertanian di seluruh dunia. Morgan Stanley, yang baru saja bergabung dalam antrian membantu Departemen Keuangan AS, belakangan membeli 40 ribu hektar lahan pertanian di Ukraina. Namun tetap kalah jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Renaissance Capital, sebuah biro investasi dari Rusia, yang memiliki hak perolehan lahan pertanian di Ukraina seluas 300 ribu hektar. Faktanya, wilayah paling subur yang terbentang mulai dari Ukraina hingga selatan Rusia menjadi arena kompetisi perebutan tanah yang paling panas. Black Earth Farming, kelompok investor asing dari Swedia, memegang kendali akuisisi 331 ribu hektar lahan pertanian di wilayah bumi hitam Rusia. Alpcot-Agro, perusahaan investasi

Swedia yang lain, telah membeli hak atas lahan seluas 128 ribu hektar juga di sana. Sementara Landkom, kelompok investor asing dari Inggris, telah membeli lahan pertanian hingga 100 ribu hektar di Ukraina dan berjanji akan memperluasnya hingga 350 ribu hektar pada tahun 2011. Semua lahan ini akan digunakan untuk memproduksi padi, minyak nabati, daging dan susu untuk memenuhi pasar dunia yang tengah kelaparan dan terutama bagi mereka yang mampu membayarnya.

Kecepatan dan ketepatan trend investasi jenis baru ini sangat mencengangkan. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang menjadi target investasi, yakni: Malawi, Senegal, Nigeria, Ukraina, Rusia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Brasil, Paraguay bahkan hingga Australia. Negara-negara ini telah diidentifikasi sebagai negara-negara yang menawarkan tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi dan pada beberapa level memiliki lahan potensial dalam hal pertumbuhan produktivitas. Rata-rata para investor ini menetapkan batas waktu atas tanah-tanah tersebut hingga 10 tahun, tentu saja dengan pengertian yang sangat jelas bahwa mereka harus membuat tanah tersebut sangat-sangat produktif dan membangun infrastruktur pemasaran, tidak hanya duduk bermalasan-malasan. Dengan cara ini diperkirakan setiap tahunnya mereka memperoleh suku bunga 10-40% di Eropa dan 400% di Afrika. Sekali lagi hal yang baru dan khusus pada fenomena ini adalah bahwa kelompok (lembaga-lembaga) keuangan telah memperoleh hak dasar atas tanah, dan kebanyakan langkah ini terjadi hanya dalam beberapa waktu terakhir ketika pasar keuangan global tengah kolaps. Namun, untuk sementara waktu apa yang sesungguhnya mereka lakukan terhadap nasib pertanian di negara-negara tersebut di waktu mendatang adalah sebuah pertanyaan besar.

Apa arti semua ini?

Satu hal yang ditunjukkan dari peristiwa-peristiwa perampasan lahan ini adalah pemerintah di manapun telah kehilangan kepercayaan pada pasar. Kepercayaan tersebut telah diguncangkan oleh krisis pangan global, yakni ketika negara-negara secara tiba-tiba jatuh pada situasi dimana terjadi kelangkaan pangan yang didorong oleh spekulasi pasar dibandingkan oleh penawaran dan permintaan. Maksud dari negara-negara gurun, yang berada di antara negara-negara perampas tanah, sangatlah jelas yakni untuk (a) mengamankan pasokan bahan makanan melalui kepemilikan dan kontrol secara langsung atas lahan pertanian di luar negeri, dan (b) mengeluarkan pedagang dan usahawan menengah sebanyak mungkin dalam upaya memotong biaya impor bahan pangan hingga 20-25 persen. Mereka didorong untuk pergi ke tempat-tempat seperti Islamabad dan Bangkok dan meminta pemerintahan negara setempat untuk mencabut larangan ekspor atas beras hanya untuk lahan pertanian tertentu. Pada dasarnya inilah kekejian yang ditunjukkan secara mencolok dari seluruh aktivitas pasar terbuka dan perdagangan bebas, yang di lain sisi mendapat banyak pujian dari para penasehat ekonomi Barat selama paling tidak empat dekade.

Isu-isu dasar lain yang mengemuka yang tak bisa diacuhkan adalah bahwa para pekerja, petani dan komunitas lokal akan kehilangan akses atas tanah bagi pemenuhan produksi pangan lokal mereka. Hal paling dasar dalam membangun kedaulatan pangan telah secara mudah dipertukarkan. Pemerintah, para penanam modal dan biro-biro pembangunan yang telah terlibat dalam proyek ini memiliki argumentasi bahwa lapangan pekerjaan akan tercipta dan bahan pangan akan tersedia. Namun hal-hal tersebut tidak akan memindahkan tanah dan peluang bahwa adanya

pekerjaan atau kemungkinan tinggal di atas tanah tersebut. Faktanya, kenyataan yang terjadi adalah masalah sebenarnya dari perampasan tanah ini tidak sesederhana dari sekadar memberikan pihak asing kontrol atas lahan pertanian dalam negeri. Ini terkait dengan restrukturisasi. Tanah-tanah tersebut akan berubah dari lahan garapan skala kecil atau hutan, menjadi kompleks industri besar yang terhubung dengan pasar besar di luar negeri. Petani tidak akan pernah lagi menjadi petani secara utuh, baik saat ada pekerjaan maupun tidak ada. Bisa jadi inilah konsekuensi terbesar atas permasalahan ini.

Pesan penting ketiga yang harus dikemukakan adalah bahwa sebenarnya investasi di bidang pertanian adalah sebuah langkah baik dan apa yang disebut sebagai momentum Selatan-Selatan dibalik kesepakatan pertanian di luar negeri ini adalah hal yang bagus. Kita memang perlu untuk berinvestasi lebih besar di bidang pertanian. Dan solidaritas Selatan-Selatan serta kerja sama pembangunan ekonomi, di luar yang telah diraih oleh imperialisme (barat maupun selatan), dapat menjadi jalan yang tepat dalam mencapainya. Namun pertanyaannya adalah pertanian seperti apa? Dan ekonomi macam apa? Siapa yang akan mengendalikan investasi ini dan siapa yang diuntungkan dari mereka? Resiko dari usaha mencari bahan pangan dan keuntungan dengan cara membuka lahan pertanian di luar wilayah negara untuk kemudian dialirkan ke negara lain atau kepada konsumen yang dapat membayarnya atau secara sederhana kepada orang-orang asing yang kaya raya, telah sangat nyata. Namun usaha tersebut tidak lantas mengakhiri krisis pangan. Atau pun bahkan membawa “pembangunan” bagi komunitas lokal. Dan kita pun tidak boleh lupa bahwa investasi dalam pertanian lintas negara ini akan difasilitasi melalui pakta investasi bilateral dan perjanjian perdagangan bebas yang

lebih luas jangkauannya, yang membawa masalah yang lebih sulit dipecahkan di masa depan. Seperti yang dilakukan oleh Negara-negara Teluk yang mengemas proyek ini menjadi sebuah bentuk ideologi yang dianggap lebih bersahabat dibandingkan dengan ideologi kapitalis yang digunakan oleh China hanyalah sebuah pemanis belaka investasi-investasi ini dibuat dalam desain yang lebih sesuai secara ideologis dan geopolitis. Di luar itu semua, melalui kesepakatan ini, Negara-negara Teluk tengah mendukung rejim Khartoum, seperti halnya India mendukung rejim diktator militer Burma. Beijing membawa serta tenaga kerja dan teknologinya saat memutuskan membuka pertanian di luar negeri, memindahkan keanekaragaman hayati asli wilayah setempat dan menghempaskan serikat perdagangan lokal. Jadi, di samping kebutuhan investasi dan kebijakan Selatan-Selatan, siapa sebenarnya yang diuntungkan masih merupakan pertanyaan besar dan belum terjawab.

Lalu bagaimana dengan pembaruan agraria? Sangat sulit dibayangkan bagaimana di negara yang telah menyerahkan lahan pertaniannya kepada negara lain atau kepada investor swasta, sehingga mereka dapat memproduksi bahan pangan yang akan dikapalkan kepada masyarakat lain di luar mereka, dapat melakukan apa saja kecuali membawa kita pada arah yang berbeda dan memunculkan banyak gerakan perlawanan bagi pembaruan agraria sejati dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini terutama terjadi sejak banyak negara target sejatinya adalah importir pangan bagi negara mereka sendiri yang memiliki konflik yang sangat serius terkait dengan masalah tanah. Di Pakistan, gerakan petani telah mengumandangkan alarm atas kehidupan 25 ribu penduduk desa yang harus dipindahkan jika proposal dari Qatar untuk memproduksi sebagian dari pangan mereka secara *outsource* di provinsi

Punjab disetujui.¹³ Sementara di Mesir, petani skala kecil di distrik Qena telah bertarung mati-matian untuk mendapatkan kembali 1.600 hektar lahan yang saat ini diberikan kepada Kobebussan, konglomerat agrobisnis dari Jepang, untuk memproduksi makanan yang akan diekspor ke Jepang.¹⁴ Di Indonesia, aktivis menduga rencana Arab Saudi mendirikan pusat pertanian padi di Merauke, dengan lahan seluas 1,6 juta hektar yang akan dipegang oleh sebuah konsorsium yang terdiri atas 15 perusahaan untuk memproduksi beras yang akan diekspor ke Riyadh, akan memotong hak penduduk asli Papua memveto proyek ini.¹⁵ Kegigihan yang diperlihatkan Bank Dunia dan lembaga yang lain dalam membuat kendali atas lahan pertanian berada di tangan investor luar negeri yang kelaparan jauh lebih mudah, dan dianggap sebagai jalan keluar dari belitan krisis pangan. Namun hal ini dapat berakhir saat terjadi ledakan konflik.

Isu besar lain yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa kesepakatan-kesepakatan ini akan mendorong lebih jauh pertanian berorientasi ekspor. Tidak seluruh negara yang menjadi target dapat menerapkan hal tersebut secara sederhana. Tekanan besar selama beberapa dekade terakhir terhadap produksi bahan pangan bagi pasar luar dibandingkan dengan pasar dalam negerilah yang telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang terutama di Asia dan Afrika pada krisis pangan di

¹³ "Pakistan eyeing corporate farming amid rising wheat crisis," Kuwait News Agency, 11 Oktober 2008. <http://tinyurl.com/63dhlh>.

¹⁴ Land Centre for Human Rights, "Once more the farmers of the village of el-Mrashda are standing in the face of the blowing wind... Who will protect their rights," Kairo, 15 Oktober 2008. <http://www/lchr-eg.org/112/08-36.htm>.

¹⁵ "Merauke mega-project raises food fears", Down to Earth, No.78, London, August 2008. <http://dte.gn.apc.org/78 dpad.htm>.

selama 2007 hingga 2008 ini. Tidak semua orang mampu membeli makanan berdasarkan harga di pasar dunia, terutama sejak upah tenaga kerja dan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat tidak mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, sebagian besar akuisisi tanah ini berarti membangun korporasi lahan pertanian yang lebih besar—seperti di Laos, Pakistan atau Nigeria—untuk memproduksi bahan pangan ekspor, semakin menguatkan permasalahan. Memang benar bahwa pada beberapa kesepakatan terdapat komitmen untuk memberikan cadangan makanan, baik bagi komunitas lokal di wilayah tersebut maupun bagi pasar domestik. Beberapa bahkan memasukkan agenda sosial seperti membangun rumah sakit atau sekolah. Meski demikian, mereka juga mempromosikan model industri pertanian yang telah menciptakan kemiskinan dan perusakan lingkungan, memperburuk hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dari lahan pertanian yang menggunakan bahan kimia dan hasil panen yang telah terkontaminasi penggunaan organisme rekayasa genetis. Jika observasi belaka tidaklah cukup, banyak statistik membuktikan bahwa telah tumbuh jurang yang sangat besar antara si kaya dan si miskin, mereka yang terpenuhi pangannya dengan yang kelaparan sebagai hasil dari fenomena ini.

Akhirnya, pertanyaan yang paling nyata dari semua ini adalah apa yang akan terjadi dalam waktu yang panjang ketika kamu diberikan kesempatan mengendalikan lahan pertanian di negaramu bagi para investor dan negara asing?